



**RANCANGAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2021**

Alamat : Jalan Komplek Pertanian Padang Tujuh, Kabupaten Pasaman Barat

Telp/Fax : (0753) 7464167

Website : bpbd.pasamanbaratkab.go.id

Email : bpbdpasbar@ymail.com

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun pertama dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Program Kegiatan pada RENJA 2022 ini mengacu pada Program Kegiatan pada RENSTRA tahun pertama dengan tetap sehingga disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya juga merumuskan program/kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya pada tahun 2021-2026 untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) BPBD Kabupaten Pasaman Barat Anggaran 2022. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja SKPD tahun 2022 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program / kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2021.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	44
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	44
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	48
3.3 Program dan Kegiatan	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	60
BAB V PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

Table 1 T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (tahun berjalan) Kabupaten Pasaman Barat	10
Table 2 T-C25 Tujuan BPBD Kabupaten Pasaman Barat Mengacu Pada Misi Bupati Pasaman Barat Tahun 2021-2026	21
Table 3 T.C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Pasaman Barat.....	22
Table 4 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja BPBD.....	27
Table 5 T-C.31 Review terhadap rancangan awal RKPD BPBD Tahun 2022 Kabupaten Pasaman Barat	29
Table 6 Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	38
Table 7 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Kabupaten Pasaman Barat.....	49
Table 8 T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPBD Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023.....	51
Table 9 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Pasaman Barat Pada Tahun 2022	60
Table 10 T-C.34 Rencana Program dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

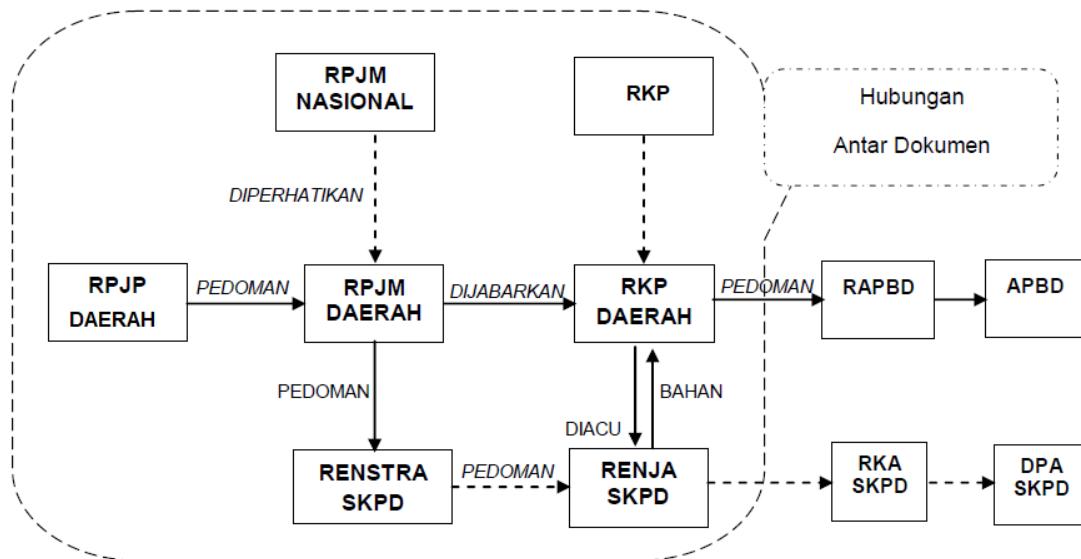
Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat. mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2022.
3. program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.

Mengingat arti strategis RENJA SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA BPBD Tahun 2022 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kabupaten;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Keterkaitan antara Renja BPBD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut:



1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat (BPBD) Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Manajemen Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Logistik;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Peralatan;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
30. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
33. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2021;

34. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENJA BPBD Tahun 2022 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2022 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPBD Tahun 2022.

1.3.1 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA BPBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ini adalah:

1. Untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan Daerah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan RENJA BPBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 meliputi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2020

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada tahun 2020, BPBD Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 6 program yang terdiri dari 18 kegiatan. Sementara pada tahun 2021 BPBD Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 2 program dengan 11 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja BPBD tahun 2021 memuat pencapaian target kinerja tahun 2020 berdasarkan renja tahun 2020. Sementara itu, evaluasi pelaksanaan renja BPBD tahun 2021 memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPBD pada tahun sebelumnya serta yang akan datang. Hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja BPBD pada tahun 2020 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan yaitu 2021 disajikan pada table 1 T-C.29 di bawah ini :

Table 1 T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)
Kabupaten Pasaman Barat

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
Bidang Urusan Sosial									
program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	-	94%	100%	100%	100%	-	-	-
Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara	-	81 unit	40 Unit	40 unit	100%	-	-	-
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
Pengadaan/Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah pengadaan gedung kantor	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	-	-	-
Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin	Jumlah pengadaan peralatan/kendaraan dan mesin	-	26 Unit	43 Unit	43 Unit	100%	-	-	-
Penyediaan Sewa Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang disewa	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur yang profesional	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat	-	10 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	-	-	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Program Peningkatan Tanggap Darurat Bencana	Cakupan perlindungan korban pada saat tanggap darurat bencana	-	50%	59,36%	59,36%	59,36%	-	-	-
Operasional kedaruratan dan logistik	Percentase pemenuhan operasional kedaruratan dan logistic	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
Peningkatan kemampuan satgas penanggulangan bencana daerah	Jumlah satgas PB kabupaten Pasaman Barat yang mengikuti pelatihan	-	30 Orang	25 Orang	0 Orang	0%	-	-	-
Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana	Percentase pemulihan daerah pasca bencana	-	100%	100%	50%	50%	-	-	-
Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah sarana dan prasarana pasca bencana yang mendapatkan rehabilitasi dan rekonstruksi	-	15 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	-	-	-
Pelatihan Pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitu pasna)	Jumlah peserta pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana	-	-	0 Orang	0 Orang	0%	-	-	-
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	-	6 Nagari	3 Nagari	3 Nagari	100%	-	-	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Simulasi penanganan dan penanggulangan bencana gempa bumi	Jumlah peserta yang mengikuti simulasi penanganan dan penanggulangan bencana gempa bumi	-	100 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	-	-	-
Penguatan kelembagaan pusat pengendalian operasional penanggulangan bencana (Pusdalops)	Persentase pemenuhan kebutuhan pusdalops	-	94,62%	100%	100%	100%	-	-	-
Pembinaan relawan penanggulangan bencana	Jumlah peserta pembinaan relawan penanggulangan bencana	-	30 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	-	-	-
Penguatan kelembagaan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Persentase tersedianya operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan KSB Nagari	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan KSB nagari	-	100 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	-	-	-
Sosialisasi komunikasi, informasi, dan edukasi daerah rawan bencana	Percentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	-	-	100%	77,41%	77,41%	-	-	-
Penyusunan Kajian dan Rencana Kebencanaan	Jumlah dokumen rencana kebencanaan	-	-	0 Dok	0 Dok	0%	-	-	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	100%	-	-	-	-	100%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	100%	-	-	-	-	100%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	23 Orang	-	-	-	-	23 Orang		
Penyediaan Administrasi Pelaksanakan Tugas ASN	Jumlah Non PNS(PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	10 Orang	-	-	-	-	10 Orang		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola BPBD	668 Unit	-	-	-	-	621 Unit		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN penatausahaan	4 Orang	-	-	-	-	1 Orang PNS		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Barang Milik Daerah						2 Orang THL		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	100%	-	-	-	-	100%		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat	10 Orang	-	-	-	-	2 Orang		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	-	-	-	-	100%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan alat listrik dan elektronik	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diikuti	24 Kali	-	-	-	-	24 Kali		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	100%	-	-	-	-	100%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	7 Unit	-	-	-	-	1 Unit		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor	2 Unit	-	-	-	-	1 Unit		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%	-	-	-	-	100%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Air, listrik, dan internet untuk operasional Kantor	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	100%	-	-	-	-	100%		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	21 Unit 4 Orang	-	-	-	-	24 Unit 4 Orang THL		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	38 Unit	-	-	-	-	29 Unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket		
Program Penanggulangan Bencana	Persentase pemulihan daerah pasca bencana	100%	-	-	-	-	1,72%		
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang memperoleh informasi bencana	100%	-	-	-	-	100%		
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengandinyatakan sah/legal	100%	-	-	-	-	0%		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencan Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencan)	Percentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	-	-	-	-	100%		
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	37%	-	-	-	-	37%		
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Percentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100%	-	-	-	-	100%		
Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan KSB nagari	100 Orang	-	-	-	-	100 Orang		
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1. Jumlah peserta pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana 2. Jumlah sarana dan prasarana pasca bencana yang	60 Orang 17 Unit	-	-	-	-	60 Orang 17 Unit		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	mendapatkan rehabilitasi dan rekonstruksi								
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah satgas PB Kabupaten Pasaman Barat yang mengikuti pelatihan	30 Orang	-	-	-	-	30 Orang 17 Orang		
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	75%	-	-	-	-	75%		
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Percentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	-	-	-	-	100%		
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	percentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	-	-	-	-	100%		
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga penyedia logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	6 Orang	-	-	-	-	6 Orang		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Percentase penataan Sistem dasar penanggulangan bencana	40%	-	-	-	-	40%		
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	12 Kali	-	-	-	-	12 Kali		
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah jenis informasi kebencanaan yang dikelola	5 Jenis	-	-	-	-	5 Jenis		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sesuai Visi dan Misi BPBD yang tertuang dalam RENSTRA BPBD tahun 2021-2026 maka hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran adalah sebagai Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2021-2026.

Visi: “Mewujudkan Pasaman Barat Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”.

Misi :”Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan”

Table 2 T-C25
Tujuan BPBD Kabupaten Pasaman Barat Mengacu Pada Misi Bupati Pasaman Barat
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1	Pelestarian lingkungan hidup, penataan ruang wilayah, dan penanggulangan bencana	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80
2	Penerapan tata kelola pemerintahan professional, akuntabel dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	83%	84%	85%	86%	87%
			Level Maturitas SPIP	3	3	4	4	4
			Nilai WBK – WBBM	WBK – WBBM	WBK – WBBM	WBK – WBBM	WBK – WBBM	WBK – WBBM

Analisis kinerja Utama BPBD sesuai dengan RENSTRA BPBD merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran Strategis instansi Pemerintah, yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam capaian Sasaran Strategis tahun 2021 adalah sebagai Tabel T.C.30 berikut:

Table 3 T.C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Pasaman Barat

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Percentase (%) penyelesaian dokumen Kajian Risiko Bencana KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	-	100%	100%	100%	100%	0%	0%		100%	Tahun 2021 kegiatan penyusunan KRB tidak jadi dilaksanakan karena anggaran yang tidak tersedia
2	Percentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	65,05%	100%		100%	
3	Percentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-		100%	Penyusunan RPB belum dianggarkan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Percentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-		100%	Penyusunan Renkon belum dianggarkan
5	Percentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%		100%	Kegiatan pencegahan dan mitigasi tidak dilaksanakan karena anggaran yang tidak tersedia
6	Percentase (%) jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%		100%	Kegiatan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana tidak dilaksanakan karena anggaran yang tidak tersedia
7	Percentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	70,31%	100%		100%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Percentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	Kegiatan ini belum dianggarkan
9	Percentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan ini disesuaikan dengan kejadian luar biasa (KLB)
10	Percentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan ini disesuaikan dengan status darurat bencana yang terjadi
11	Percentase (%) jumlah petugas yang dalam penanganan darurat bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah petugas yang aktif dalam penanggulangan bencana
12	Percentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	96%	100%	100%	100%	Data disesuaikan dengan jumlah korban yang ditolong dan dievakuasi

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Tingkat Pelayanan BPBD

Secara kelembagaan, BPBD memiliki fungsi sebagai koordinator, komando, dan pelaksana dalam tugas penanggulangan bencana. Tugas tersebut meliputi pra bencana (sebelum terjadinya bencana), saat bencana (saat tanggap darurat), dan pascabencana (masa setelah keadaan darurat bencana belalui). Tugas ini sangat erat kaitannya dengan SKPD teknis, instansi, dan lembaga lainnya. Kompleksitas tugas dan fungsi tersebut akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 85 Tahun 2011 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat, berikut adalah tugas BPBD Kabupaten Pasaman Barat :

- a. Melaksanakan penyusunan dan pengendalian program di bidang penanggulangan bencana di daerah;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- c. Melaksanakan penetapan pedoman dan pengarahan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- d. Melaksanakan penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- f. Melaksanakan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- g. Melaksanakan penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta resiko bencana;

- h. Melaksanakan pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam pembangunan;
- i. Melaksanakan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- j. Melaksanakan pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
- k. Melaksanakan pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
- l. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- n. Melaksanakan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah; dan
- o. Melaksanakan pelaksanaan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPBD Kabupaten Pasaman Barat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Melaksanakan pengelolaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana.

b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD

Berdasarkan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Pasaman Barat untuk itu perlu dilakukan identifikasi masalah agar tugas dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabilitas. Adapun permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Sinergisitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal;
2. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana terutama pada daerah rawan bencana belum sepenuhnya terlaksana;
3. Belum memadainya sarana dan prasarana penanganan bencana baik secara kuantitas maupun kualitas;

4. Belum terpenuhinya SDM yang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam penanggulangan bencana;
5. Belum adanya standarisasi yang dituangkan dalam peraturan daerah mengenai besaran kompensasi yang diberikan atas kerusakan akibat bencana.
6. Belum adanya dokumen pendukung kebijakan dalam penanggulangan bencana (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontijensi).

c. Penentuan Isu-Isu Strategis

Banyaknya jenis bahaya alam yang terjadi dan berpotensi mengancam wilayah Kabupaten Pasaman Barat yang membuat wilayah ini termasuk wilayah rawan bencana. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipetakan, dirumuskanlah isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi unit kerja BPBD. Rumusan isu strategis ini menggunakan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, rasional dan dalam kerangka waktu yang memadai, dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Table 4 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja BPBD

Unit Kerja	Isu Strategis
Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas: peningkatan kapasitas BPBD 2. Instrumen Penanggulangan Bencana: dokumentasi 3. Koordinasi: koordinasi antar bidang, perencanaan, pengendalian, pelaporan serta monitoring dan evaluasi 4. Data dan informasi: dokumentasi 5. Prosedur: prosedur tetap internal 6. Implementasi: logistik kantor
Pencegahan dan Kesiapsiagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas: kapasitas SKPD untuk pengarusutamaan Penanggulangan Bencana 2. Instrumen penanggulangan bencana: fasilitasi KRB, RPB, RAD-PRB, dan Renkon per jenis bencana 3. Koordinasi: pengarusutamaan PRB dalam sektor/SKPD 4. Data dan informasi: peta risiko bencana dan data kerawanan. 5. Prosedur: prosedur pengintegrasian PRB dalam sektor/SKPD 6. Implementasi: rapat-rapat
Kedaruratan dan Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas: kapasitas relawan (TRC) 2. Instrumen penanggulangan bencana: fasilitasi Rencana Kontijensi, status bencana, prosedur tetap, dan prosedur tetap komando 3. Koordinasi: belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tanggap darurat dan pengelolaan logistik 4. Data dan informasi: belum tersedianya data dan informasi serta evakuasi yang cepat dan akurat 5. Prosedur: belum tersedianya tenaga terlatih untuk evakuasi,

Unit Kerja	Isu Strategis
	mobilisasi, logistik, PPGD dan komando 6. Implementasi: siap siaga bencana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1. Kapasitas: kapasitas untuk <i>assesment</i> pasca bencana 2. Instrumen penanggulangan bencana: fasilitasi panduan rehabilitasi dan rekonstruksi 3. Koordinasi: koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi, serta status kerusakan 4. Data dan informasi: data kerusakan dan kehilangan 5. Prosedur: pemetaan kerusakan dan kehilangan, serta pendataan kebutuhan 6. Implementasi: monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi

Isu – isu tersebut akan menjadi perhatian utama bagi BPBD Kabupaten Pasaman Barat dalam menyusun perencanaan untuk periode Rencana Strategis yang disusun ini sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan hingga program dan kegiatan yang akan dijalankan dapat selaras dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD dan juga sinkron dengan produk – produk perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat dan instansi penanggulangan bencana vertikal.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2022, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Table 5 T-C.31
Review terhadap rancangan awal RKPD BPBD Tahun 2022
Kabupaten Pasaman Barat

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	100%	3.888.373.369	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	100%	3.888.373.369		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat	Persentase realisasi keuangan	100%	2.797.234.369	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat	Persentase realisasi keuangan	100%	2.797.234.369		
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	21 Orang	2.565.434.369	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	23 Orang	2.565.434.369		
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanakan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Non PNS(PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	10 Orang	128.300.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanakan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Non PNS(PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	10 Orang	128.300.000		
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 Bulan	103.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 Bulan	103.500.000		
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Barang Milik Daerah	668 Unit	41.900.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola	668 Unit	41.900.000		

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
			yang dikelola BPBD					BPBD			
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah ASN penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Orang	41.900.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah ASN penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Orang	41.900.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	100%	40.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	100%	40.000.000	
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat	10 Orang	40.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat	10 Orang	40.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	178.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	178.000.000	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah penyediaan alat listrik dan elektronik	1 Paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah penyediaan alat listrik dan elektronik	1 Paket	3.000.000	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 Paket	50.000.000	

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasaman Barat	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor	1 Paket	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasaman Barat	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor	1 Paket	5.000.000	
4.	Menyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan	1 Paket	20.000.000	Menyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan	1 Paket	20.000.000	
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diikuti	24 Kali	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diikuti	24 Kali	100.000.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasaman Barat	Percentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	100%	463.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasaman Barat	Percentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	100%	463.000.000	
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	7 Unit	83.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	7 Unit	83.000.000	
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pengadaan gedung kantor	2 Unit	380.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pengadaan gedung kantor	2 Unit	380.000.000	

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasaman Barat	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%	57.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasaman Barat	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%	57.000.000	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Air, listrik, dan internet untuk operasional Kantor	12 Bulan	57.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Air, listrik, dan internet untuk operasional Kantor	12 Bulan	57.000.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	100%	311.239.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasaman Barat	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	100%	311.239.000	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR 2. Jumlah Non PNS (THL) yang	21 Unit 4 Orang	199.379.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR 2. Jumlah Non PNS (THL) yang	21 Unit 4 Orang	199.379.000	

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
			melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan					melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan			
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	38 Unit	86.860.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	38 Unit	86.860.000	
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara	1 Paket	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara	1 Paket	25.000.000	
II.	Program Penanggulangan Bencana	Kab. Pasaman Barat	Percentase pemulihan daerah pasca bencana	100%	1.766.310.357	Program Penanggulangan Bencana	Kab. Pasaman Barat	Percentase pemulihan daerah pasca bencana	100%	1.766.310.357	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Percentase masyarakat yang memperoleh informasi bencana	100%	390.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Percentase masyarakat yang memperoleh informasi bencana	100%	390.000.000	

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
1.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	300.000.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	300.000.000	
2.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Pasaman Barat	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	90.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Pasaman Barat	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	90.000.000	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Pasaman Barat	Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	37%	1.002.910.357	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Pasaman Barat	Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	37%	1.002.910.357	
1.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100%	100.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100%	100.000.000	

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
2.	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan KSB nagari	100 Orang	100.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan KSB nagari	100 Orang	100.000.000	
3.	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	1. Jumlah peserta pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana 2. Jumlah sarana dan prasarana pasca bencana yang mendapatkan rehabilitasi dan rekonstruksi	60 Orang 17 Unit	654.510.357	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	1. Jumlah peserta pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana 2. Jumlah sarana dan prasarana pasca bencana yang mendapatkan rehabilitasi dan rekonstruksi	60 Orang 17 Unit	654.510.357	
4.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah satgas PB Kabupaten Pasaman Barat yang mengikuti pelatihan	30 Orang	148.400.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah satgas PB Kabupaten Pasaman Barat yang mengikuti pelatihan	30 Orang	148.400.000	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Pasaman Barat	Cakupan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	75%	243.600.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Pasaman Barat	Cakupan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	75%	243.600.000	

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
1.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Percentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	142.300.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Percentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	142.300.000	
2.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	percentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	25.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	percentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	25.000.000	
3.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah tenaga penyedia logistik penyelamat an dan evakuasi korban bencana	6 Orang	76.300.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah tenaga penyedia logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	6 Orang	76.300.000	
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Pasaman Barat	Percentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	40%	129.800.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Pasaman Barat	Percentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	40%	129.800.000	

No	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	
1.	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah rapat koordinasi antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	12 Kali	50.000.000	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah rapat koordinasi antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	12 Kali	50.000.000	
2.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah jenis informasi kebencanaan yang dikelola	5 Jenis	79.800.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah jenis informasi kebencanaan yang dikelola	5 Jenis	79.800.000	
JUMLAH				5.654.683.726						5.654.683.726	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Pasaman Barat dalam sebagai koordinator, pelaksana dan komando penanggulangan bencana, maka didapatkan data usulan program dan kegiatan masyarakat. Berikut daftar usulan dari masyarakat tahun 2020 beserta tindak lanjutnya :

Table 6
Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Jenis Bencana	Lokasi				Waktu Bencana	Akibat Bencana	Penanganan Sementara
		Jorong	Nagari	Kecamatan	Titik Koordinat			
1	Banjir Sungai Btg. Bayang	Lombok	Ujung Gading	Lembah Melintang	-	04 September 2020	Penahan Tebing Mushalla Al-Muttaqin runtuh terbawa arus	
2	Banjir	Langgam	Kinali	Kinali	-	Sering Terjadi	Rusaknya Jaringan Irigasi utk Aliran Pertanian Pemakai Air Sepakat Rantau Panjang	
3	Banjir Sungai Btg. Talu dan Btg. Kularian	Perhimpunan	Talu	Talamau	-	Sering Terjadi	Tebing Sungai terancam runtuh dan membahayakan pemukiman masyarakat	
4	Banjir Sungai Btg. Aia Parasan	Pasa Lamo	Kajai	Talamau	-	10 Oktober 2018	Terkikisnya Tebing Sungai Btg. Parasan	
5	Banjir Sungai Kuranji	Kampung Alang	Kajai	Talamau	-	10 Oktober 2018	Terkikisnya Tebing Sungai Kuranji	
6	Jembatan Sungai Btg. Ganggo Rusak akibat Curah Hujan Tinggi	Bancah Kariang	Kinali	Kinali	-	15 September 2020	Jembatan penghubung antara Desa Wonosari dg Kampung Padang Jua Jorong IV Koto, Sumber Agung Jorong Tandikek rusak berat, menyulitkan masyarakat dalam mengeluarkan hasil pertanian	

No	Jenis Bencana	Lokasi				Waktu Bencana	Akibat Bencana	Penanganan Sementara
		Jorong	Nagari	Kecamatan	Titik Koordinat			
7	Banjir Sungai Btg. Tambau	Ampek Koto Barat	Persiapan Ampek Koto Barat	Kinali	-	-18 Juli 2020	Merendam Pemukiman disekitar Sungai	
8	Banjir Sungai Btg. Haluan	Simpang Empat	Lingkuang Aua	Pasaman	-	Sering Terjadi	Penahan Tebing Masjid BIMBA GADANG terancam runtuh	
9	Ancaman Banjir Sungai Aia Gantung di belakang SMAN 1 Talamau	Kemakmuran	Sinuruik	Talamau	-	Sering Terjadi	Tebing belakang SMAN 1 Talamau terancam runtuh	
10	Banjir Sungai Btg. Haluan	Katimaha	Lingkuang Aua	Pasaman	-	Sering Terjadi	Bronjong Masjid Taqwa terancam runtuh	
11	Meluapnya Sungai Btg. Bayang	Koto Pinang	Persiapan Koto Gunung	Lembah Melintang	-	16 April 2020	Puluhan Btg. Sawit hanyut dan mengancam rumah penduduk	
12	Banjir dan Longsor	Guo	Rabi Jonggor	Gunung Tuleh	-	16 April 2020	Rusaknya saluran irigasi sawah masyarakat, jembatan dan jalan aspal rusak, padi masyarakat gagal panen, dan terendamnya pemukiman masyarakat	
13	(Proposal) Meluapnya Aliran Sungai Mudiak Komba	Tabek Sirah	Talu	Talamau	-	-	Aliran air sungai ke persawahan masyarakat tidak terkontrol akibat dari runtuhnya tebing sungai Mudiak Komba	
14	Proposal Permohonan Bantuan	Tabek Sirah	Talu	Talamau	-	-	Diharapkan mampu menahan tebing area persawahan masyarakat	

No	Jenis Bencana	Lokasi				Waktu Bencana	Akibat Bencana	Penanganan Sementara
		Jorong	Nagari	Kecamatan	Titik Koordinat			
	Pembangunan TPT							
15	Permohonan Bantuan Perbaikan Rumah An Sari Murni akibat Badai	Lembah Binuang	Aua Kuniang	Pasaman	-	-	Akibat Badai tersebut, sebagian atap rumah Ibu Sari Murni rusak dihantam badai	
16	Banjir Anak Aia Bancah dan Aia Batang Tareh	Padang Tujuh	Aua Kuniang	Pasaman	-	Sering Terjadi	Mengikis dan mengancam tebing yang berada di samping kiri dan kanan Masjid Almuklisin dan rumah masyarakat disekitar aliran Sungai Batang Anak Aia Bancah dan Aia Batang Tareh.	
17	Banjir Batang Aia Salak Jln. Usaha Tani	Harapan Tinggam	Sinuruik	Talamau	-	17 Januari 2020	Mengikis ABT Jembatan Batang Silalang dan Saluran DI. Aia Salak roboh sepanjang 20 m.	
18	Banjir	Benteng, Kemakmuran dan Harapan	Sinuruik dan Tinggam	Talamau	-	17 Februari 2020	Merendam lahan pertanian masyarakat seluas 7,5 Ha di Jorong Benteng, 2,5 Ha di Jorong Kemakmuran dan merendam sebagian rumah masyarakat di Jorong Harapan.	
19	Banjir	Tanjung Babolik	Sungai Aua	Sungai Aur		08 Februari 2020	Putusnya Jembatan Gantung Tj. Babolik	Pembuatan Jembatan Gantung Pengganti

No	Jenis Bencana	Lokasi				Waktu Bencana	Akibat Bencana	Penanganan Sementara
		Jorong	Nagari	Kecamatan	Titik Koordinat			
								oleh Masyarakat secara Swadaya di Jorong Tanjung Babolik
20	Tanah Terban dan Banjir	Air Haji	Sungai Aua	Sungai Aur	0.210289, 99.634735	16 Februari 2020	Badan jalan amblas dan merusak gorong-gorong jalan, sehingga merusak badan jalan sepanjang ± 4 m	
21	Banjir	Kapa Selatan	Kapa	Luhak Nan Duo		Sering Terjadi	Mengancam tebing di sekitar Jembatan Gantung Sungai Batang Kapa	
22	Proposal Permohonan Bantuan Normalisasi	Rimbo Batu	Kajai	Talamau		Sering Terjadi	Adanya penumpukan sampah dan kayu di aliran sungai sehingga menghambat aliran sungai dan menyebabkan meluapnya aliran sungai dan mengikis tebing sungai sehingga mengancam pemukiman masyarakat	
23	Proposal Permohonan Normalisasi		Desa Baru	Ranah Batahan		08 Februari 2020 & Sering Terjadi	Menggenangi padi masyarakat seluas ± 170 Ha dan beresiko mengalami puso seluas 70 Ha	

No	Jenis Bencana	Lokasi				Waktu Bencana	Akibat Bencana	Penanganan Sementara
		Jorong	Nagari	Kecamatan	Titik Koordinat			
24	Banjir Batang Air Haji	Paraman Ampalu, Tanjung Babolik, Sudirman, dan Ligawen	Rabi Jonggor	Gunung Tuleh		08 Februari 2020	Menghanyutkan 1 ponton bantuan BPBD, saluran irigasi di Jorong Paraman Ampalu terputus, terkikisnya tebing sungai di Koto Dalam Jorong Sudirman sehingga mengancam pemukiman dan merusak perkebunan masyarakat, serta mengancam jembatan di Jorong Ligawen	
25	Banjir Sungai Batang Tamiang	Tamiang Batahan dan Air Napal	Persiapan Batahan Barat	Ranah Batahan		28 Januari 2020	112 rumah terendam banjir, jalan aspal hotmix sepanjang 2 m rusak parah, dan ± 25 Ha lahan pertanian masyarakat terendam banjir	Pemberian Bantuan berupa Bronjong dari BWS V
26	Longsor di Tebing Btg. Air Dingin	Simpang Tiga Alin	Muara Kiawai Barat	Gunung Tuleh		06 Des 2016, 23 April 2018	Mengancam pemukiman masyarakat	
27	Proposal permohonan bantuan TPT akibat Longsor	Pinaga Dusun 1	Aua Kuniang	Pasaman		Sering Terjadi	Mengancam Jembatan Btg. Kromi	
28	Banjir Btg. Kenaikan	Paraman Ampalu	Rabi Jonggor	Gunung Tuleh		25 Januari 2020	Irigasi sawah masyarakat terputus dan tertimbun material	
29	Banjir Btg Bayang	Taluak Ambun	Ujung Gading	Lembah Melintang		22 Des - 24 Des 2020	Tebing sungai longsor dan mengancam 2 rumah masyarakat di tebing sungai	

No	Jenis Bencana	Lokasi				Waktu Bencana	Akibat Bencana	Penanganan Sementara
		Jorong	Nagari	Kecamatan	Titik Koordinat			
30	Banjir Btg Situang	Bukik Nilam	Aua Kuniang	Pasaman		Sering Terjadi	Pengikisan tebing sungai akibat banjir mengancam pemukiman masyarakat sepanjang 75 m	
31	Meluapnya Sungai Btg Aia Lubuk Anyia	Pinaga	Aua Kuniang	Pasaman		Sering Terjadi	Tebing sungai mengancam pemukiman dan Masjid Jami' Pinaga akibat terkikis aliran sungai	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Merujuk kepada Buku I Agenda Pembangunan Nasional tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, diketahui bahwa visi pembangunan nasional adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai **Nawacita** kedua yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkedaulatan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah darah dalam rangka Negara kesatuan.

Dari ke Sembilan misi tersebut dirumuskan 5 (lima) arahan kebijakan, adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan infrastruktur
3. Penyederhanaan regulasi
4. Penyederhanaan birokrasi
5. Transformasi ekonomi

Sementara untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. **Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin**

pemerataan;

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. **Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;**
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari 7 (tujuh) agenda prioritas tersebut pada agenda ke-dua yaitu: *“Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan”* dan agenda ke-enam : *“Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim”* terdapat beberapa sub agenda yang masing-masingnya yaitu:

1. Agenda ke-dua : *“Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan”*
 - a. Pembangunan sektro/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
 - c. Pembangunan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
 - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
 - e. **Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.**
2. Agenda ke-enam : *“Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim”*
 - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b. **Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan**
 - c. Pembangunan rendah karbon.

Pada sub agenda ke-dua dan ke-enam jelas terbaca bahwa pengelolaan bencana merupakan salah satu sub agenda prioritas yang masuk dalam agenda prioritas untuk mewujudkan pengembangan wilayah, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Arah kebijakan dan strategi untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari: (a) peningkatan kualitas lingkungan hidup; **(b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim;** dan (c) pembangunan rendah karbon. Strategi untuk mewujudkan peningkatan ketahanan bencana dan iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Adapun strategi untuk mewujudkan arahan kebijakan ketahanan bencana dan iklim pada RPJMN 2020-2024 mencakup:

1. **Penanggulangan bencana**, yang dilaksanakan dengan:
 - a. Penguatan data, informasi, dan literasi bencana;
 - b. Penguatan system, regulasi, dan tata kelola bencana;
 - c. Penguatan rencana pengurangan risiko bencana melalui rencana aksi pengurangan risiko bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan rencana aksi adaptasi perubahan iklim;
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana mitigasi dan penanggulangan bencana;
 - e. Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana;
 - f. Penguatan penanganan darurat bencana;
 - g. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
 - h. Penguatan system mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan INATEWS dan WHEWS; dan
 - i. Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui *social re-engineering* ketahanan bencana multilevel, terutama level keluarga, komunitas maupun desa; dan
 - j. Peningkatan pembangunan dan inovasi skema alternative pembiayaan penanggulangan bencana.
2. Peningkatan ketahanan iklim, yang dilaksanakan dengan implementasi Rencana nasional Adaptasi Perubahan iklim (RAN-API) pada sektor-sektor prioritas, melalui:
 - a. Perlindungan kerentanan pesisir dan sector kelautan, baik berupa penguatan infrastruktur adaptasi berbasis ekosistem, penyadartahan masyarakat, pengembangan teknologi, maupun diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir;

- b. Perlindungan ketahanan air pada wilayah berisiko iklim, melalui peningkatan penyediaan pasokan air baku dan perlindungan terhadap daya rusak air;
- c. Perlindungan ketahanan pangan terhadap perubahan iklim; serta
- d. Perlindungan kesehatan masyarakat dan lingkungan dari dampak perubahan iklim

Dari konstruksi perencanaan pembangunan nasional ini terlihat bahwa urusan pengelolaan kebencanaaan (penanggulangan bencana) merupakan salah satu sub agenda strategis pembangunan nasional dalam Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Hal ini diwujudkan dalam Visi Penanggulangan Bencana 2020-2024 yaitu:

“Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”

Dengan arahan kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2020-2024 yaitu “Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan Yang Berketahanan Untuk Pembangunan Berkelanjutan.”

Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah “Menurunnya kerugian ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akibat dampak bencana.”

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan dan strategi Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi :
 - a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana;
 - b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak.
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:
 - a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana;
 - b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;

- c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (*collaborative social engineering*);
 - d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi: Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;
 5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi: Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Selanjutnya lima langkah strategi tersebut agar dapat direalisasikan secara terencana dan terukur selanjutnya akan diaplikasikan secara konkret dalam bentuk program dan kegiatan dari satuan kerja pelaksana penanggulangan bencana baik di tingkat nasional dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun di tingkat daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Perumusan program dan kegiatan ini pada tingkat daerah juga harus mengacu kepada RPJMD yang berlaku agar selaras dengan visi misi dan program prioritas dari Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan Jangka Menengah BPBD Kabupaten Pasaman Barat adalah :

- a. Pelestarian lingkungan hidup, penataan ruang wilayah, dan penanggulangan bencana;
- b. Penerapan tata kelola pemerintahan professional, akuntabel dan inovatif.

2. Sasaran

Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Pasaman Barat adalah :

- a. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana;
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Table 7 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Kabupaten Pasaman Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan masyarakat yang aman dan tenram, dan tangguh berlandaskan ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terwujudnya masyarakat yang aman, tenram, tangguh dan berketahanan	Indeks Ketahanan Daerah	1.20	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.80
			Percentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	77,55	100	100	100	100	100	100
			persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	14,06	100	100	100	100	100	100
			Percentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	99	100	100	100	100	100	100
2	Penerapan tata kelola pemerintahan professional, akuntabel dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	CC	B	B	B	BB	BB	BB
			Level Maturitas SPIP	2 (2019)	3	3	3	4	4	4
			Opini BPK atas laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja BPBD Tahun 2022, Program, Kegiatan dan

Sub Kegiatan tahun 2022 disusun berdasarkan :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah;
- b. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional;
- c. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan BPBD.

Program dan Kegiatan BPBD Tahun 2022 direncanakan berjumlah 2 Program, 11 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan total pagu dana/pagu indikatif sebesar **Rp 5.654.683.726,00 (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua uuuh Enam Rupiah)**. Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, terhadap Program tidak ada perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD dan RPJMD:

1. Penyesuaian dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi;
2. Penyesuaian dengan hasil evaluasi Tahun 2020;
3. Analisa Kebutuhan Operasional.

Rencana Kerja BPBD Tahun 2022, seperti yang tercantum dalam tabel T-C.33 sebagai berikut:

Table 8 T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPBD Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023																
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Induktif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Induktif (Rp.)														
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan																				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																											
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3.888.373.369					4.277.210.706												
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.797.234.369					3.076.957.806												
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Percentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	Percentase realisasi keuangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	21 Orang	100%	2.565.434.369	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Percentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	0	2.821.977.806														
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanakan Tugas ASN	Percentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Non PNS(PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	Percentase realisasi keuangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Orang	100%	128.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Percentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	0	141.130.000														
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Percentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	Percentase realisasi keuangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	100%	103.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Percentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	0	113.850.000														
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										41.900.000					46.090.000												

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Ca tat an Pe nti ng	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Induktif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Induktif (Rp.)	
											Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Targ et		
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah ASN penatausahaan Barang Milik Daerah pada BPBD	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola BPBD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Orang	668 Unit	41.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	0	46.090.000		
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											40.000.000				44.000.000
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Orang	100%	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	0	44.000.000		
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											178.000.000				195.800.000
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah penyediaan alat listrik dan elektronik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	0	3.300.000		
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah ATK yang dibutuhkan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	0	55.000.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Ca tat an Pe nti ng	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Induktif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Induktif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			Tolak Ukur	Targ et	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelayanan peralatan penunjang pemerintah daerah	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	0	5.500.000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	20.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	0	22.000.000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diikuti	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	24 Kali	100%	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	0	110.000.000
05	01	2.07	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								463.000.000				509.300.000
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	7 Unit	100%	83.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	0	91.300.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Ca tat an Pe nti ng	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Induktif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Induktif (Rp.)	
										Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			Tolak Ukur	Targ et		
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah pengadaan gedung kantor	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Unit	100%	380.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	0	418.000.000	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										57.000.000			62.700.000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Air, listrik, dan internet untuk operasional Kantor	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	100%	57.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	0	62.700.000	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										311.239.000			342.362.900
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanak	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	21 Unit 4 Orang	100%	199.379.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	0	219.316.900	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Ca tat an Pe nti ng	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Induktif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Induktif (Rp.)	
											Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Targ et		
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	38 Unit	100%	86.860.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	0	95.546.000		
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	0	27.500.000		
1	05	03			Program Penanggulangan Bencana								1.766.310.357				1.612.941.393			
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								390.000.000				99.000.000			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Induktif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Induktif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Tar get		
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan daerah pasca bencana	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persentase masyarakat yang memperoleh informasi bencana	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase pemulihan daerah pasca bencana	100 %	-	
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase pemulihan daerah pasca bencana	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persentase masyarakat yang memperoleh informasi bencana	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	90.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase pemulihan daerah pasca bencana	100 %	99.000.000	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									1.002.910.357				1.103.201.393	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan daerah pasca bencana	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	37%	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase pemulihan daerah pasca bencana	100 %	110.000.000	
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase pemulihan daerah pasca bencana	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan KSB nagari	Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua	100%	100 Orang	37%	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase pemulihan daerah pasca bencana	100 %	110.000.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Ca tat an Pe nti ng	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Induktif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Induktif (Rp.)	
										Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			Tolak Ukur	Targ et		
								gaan bencana	Kelurahan									
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Percentase pemulihan daerah pasca bencana	1. Jumlah peserta pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana 2. Jumlah sarana dan prasarana pasca bencana yang mendapatkan rehabilitasi dan rekonstruksi	Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	60 Orang 17 Unit	37%	654.510.357	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Percentase pemulihan daerah pasca bencana	100 %	719.961.393	
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Percentase pemulihan daerah pasca bencana	Jumlah satgas PB Kabupaten Pasaman Barat yang mengikuti pelatihan	Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	30 Orang	37%	148.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Percentase pemulihan daerah pasca bencana	100 %	163.240.000	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								243.600.000				267.960.000	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Ca tat an Pe nti ng	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Induktif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Induktif (Rp.)	
											Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Targ et		
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan daerah pasca bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Cakupan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	75%	142.300.000	Pendapat an Asli Daerah (PAD)		Persentase pemulihan daerah pasca bencana	100 %	156.530.000		
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan daerah pasca bencana	persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan evakuasi korban terhadap kejadian bencana	Cakupan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	75%	25.000.000	Pendapat an Asli Daerah (PAD)		Persentase pemulihan daerah pasca bencana	100 %	27.500.000		
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan daerah pasca bencana	Jumlah tenaga penyedia logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Cakupan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 Orang	75%	76.300.000	Pendapat an Asli Daerah (PAD)		Persentase pemulihan daerah pasca bencana	100 %	83.930.000		
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									129.800.000				142.780.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Ca tat an Pe nti ng	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Induktif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Induktif (Rp.)
										Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			Tolak Ukur	Targ et	
1	05	03	2.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan daerah pasca bencana	Jumlah rapat koordinasi antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	Persentase penataan Sistem dasar penanggulangan bencana	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Kali	40%	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase pemulihan daerah pasca bencana	100 %	55.000.000
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persentase pemulihan daerah pasca bencana	Jumlah jenis informasi kebencanaan yang dikelola	Persentase penataan Sistem dasar penanggulangan bencana	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Jenis	40%	79.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase pemulihan daerah pasca bencana	100 %	87.780.000
TOTAL												5.654.683.726				5.890.152.099	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026 dalam mencapai sasaran berkurangnya potensi kerawanan bencana alam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022. Adapun rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2022 sebagai berikut :

Table 9 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Pasaman Barat Pada Tahun 2022

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
1)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanakan Tugas ASN
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2)	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4)	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.	Menyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
II.	Program Penanggulangan Bencana
1)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
1.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
2.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
2.	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3.	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
4.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
3)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
2.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
3.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
4)	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
1.	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
2.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Tahun 2022 direncanakan berjumlah 2 Program, 11 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Table 10 T-C.34
Rencana Program dan Pendanaan Indikatif
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	APBN			APBD		CSR	Desa	ket
			Dak	Hibah	Bansos	Kabupaten	Prov			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Percentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	100%				3.888.373.369				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase realisasi keuangan	100%				2.797.234.369				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	21 Orang				2.565.434.369				
Penyediaan Administrasi Pelaksanakan Tugas ASN	Jumlah Non PNS(PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	10 Orang				128.300.000				
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 Bulan				103.500.000				
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola BPBD	621 Unit				41.900.000				
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Orang				41.900.000				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	100%				40.000.000				
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat	10 Orang								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	APBN			APBD		CSR	Desa	ket
			Dak	Hibah	Bansos	Kabupaten	Prov			
						40.000.000				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%				178.000.000				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan alat listrik dan elektronik	1 Paket				3.000.000				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 Paket				50.000.000				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor	1 Paket				5.000.000				
Menyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan	1 Paket				20.000.000				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diikuti	24 Kali				100.000.000				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	100%				463.000.000				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	9 unit				83.000.000				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor	2 Unit				380.000.000				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%				57.000.000				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	APBN			APBD		CSR	Desa	ket
			Dak	Hibah	Bansos	Kabupaten	Prov			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Air dan listrik untuk operasional Kantor	12 Bulan				57.000.000				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	100%				311.239.000				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	24 Unit 4 Orang				199.379.000				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	31 Unit				86.860.000				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara	1 Paket				25.000.000				
Program Penanggulangan Bencana	Persentase pemulihan daerah pasca bencana	100%				1.766.310.357				
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang memperoleh informasi bencana	100%				390.000.000				
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%				300.000.000				
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%				90.000.000				
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	37%				1.002.910.357				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	APBN			APBD		CSR	Desa	ket
			Dak	Hibah	Bansos	Kabupaten	Prov			
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Percentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100%				100.000.000				
Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan KSB nagari	100 Orang				100.000.000				
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1. Jumlah peserta pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana 2. Jumlah sarana dan prasarana pasca bencana yang mendapatkan rehabilitasi dan rekonstruksi	1) 60 Orang 2) 17 Unit				654.510.357				
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1. Jumlah peserta pembinaan relawan penanggulangan bencana 2. Jumlah satgas PB Kabupaten Pasaman Barat yang mengikuti pelatihan	1) 30 Orang 2) 17 Orang				148.400.000				
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	75%				243.600.000				
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Percentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%				142.300.000				
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%				25.000.000				
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga penyedia logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	6 Orang				76.300.000				
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Percentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	40%				129.800.000				
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	12 Kali				50.000.000				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	APBN			APBD		CSR	Desa	ket
			Dak	Hibah	Bansos	Kabupaten	Prov			
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah jenis informasi kebencanaan yang dikelola	5 Jenis				79.800.000				
TOTAL						5.654.683.726				

BAB V

PENUTUP

RENJA BPBD Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan RENSTRA BPBD Tahun 2021-2026. RENJA BPBD Tahun 2022 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, sehingga Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Tahun 2022 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2022.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur BPBD berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022 dengan efektif dan efisien.
2. RENJA Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2022, dimana RENJA Tahun 2022 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan BPBD, seluruh aparatur BPBD secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Tahun 2022.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2022 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.
5. Renja Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah

persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Padang Tujuh, Maret 2021
Kepala Pelaksana



Drs. EDI BUSTI, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660305 199003 1 005